

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Sarana dan Prasarana

1. Pengertian Manajemen Sarana dan Prasarana

Manajemen berarti orang yang memimpin, mengarahkan dan mengelola yang diambil dari kata kerja “*manage*” yang berarti mengemudikan, mengurus dan memerintah. Asal kata manajemen yaitu dari bahasa Italia “*managiere*” yang berarti melatih kuda¹⁴. Menurut Sofyan Syafri Harahap, manajemen adalah proses mempertimbangkan dan melaksanakan tujuan yang ditetapkan oleh orang dan sumber lain.¹⁵

P. Siagian mendefinisikan manajemen sebagai kemampuan atau pengalaman untuk mempengaruhi tindakan orang lain untuk mencapai hasil yang diinginkan¹⁶. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan secara efisien, manajemen adalah proses sosial terstruktur yang memastikan bahwa orang lain berkolaborasi, berpartisipasi, mengintervensi, dan terlibat.

¹⁴Rusman, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 9.

¹⁵Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992), hal. 121.

¹⁶Sondang P Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Bumi aksara, 2008), hal. 5.

Kemampuan untuk mencapai tujuan adalah manajemen. Komponen manajemen adalah adanya proses, tujuan yang ingin dicapai, dan cara orang lain melaksanakan tujuan tersebut.¹⁷

Upaya untuk mengawasi semua aset untuk mewujudkan tujuan adalah inti dari manajemen. Oleh karena itu, manajemen dalam konteks pendidikan mengacu pada tindakan menggabungkan sumber daya yang berbeda ke dalam sistem yang komprehensif untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁸

George R. Terry mendefinisikan manajemen yang dirinci lebih lanjut oleh Saiful Nur Arif dan Iskandar Zulkarnain yaitu sebagai suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan partisipasi dalam tweak untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.¹⁹

Perencanaan, pengorganisasian, menyusun, mengarahkan, dan mengatur sumber daya untuk memenuhi tujuan tertentu adalah seni dan ilmu manajemen. Sementara manajemen sebagai seni berusaha mencapai tujuan praktis yang memberikan manfaat, manajemen sebagai ilmu berusaha menjelaskan fenomena dan kejadian.²⁰

¹⁷Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 7.

¹⁸Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, *Education Management: Analisis Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 12.

¹⁹Saiful Nur Arif dan Zulkarnain Iskandar, "Dasar-Dasar Manajemen dalam Teknologi Informasi" *Jurnal Saintikom*, Vol. 5.2 (2008), hal. 236.

²⁰M Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Medan: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 5.

Ilmu dan seni manajemen adalah penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.²¹

Beberapa definisi di atas mendefinisikan manajemen sebagai seperangkat tindakan yang digunakan untuk mengendalikan atau mengelola suatu organisasi, dengan manajer sebagai orang yang mengendalikan atau mengelola. Selanjutnya, ada berbagai cara untuk memahami manajemen, baik sebagai seni maupun sebagai ilmu.

Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh pemanfaatan secara efektif dan efisien semua prasarana dan sarana pendidikan yang ada saat ini. Menurut Pasal 45 tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, “Satuan pendidikan baik formal maupun nonformal menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik berdasarkan kemampuan fisik, intelektual, kebutuhan emosional dan psikologis”.²²

Furnitur kelas, perlengkapan, dan peralatan dianggap sebagai fasilitas pendidikan. Dari sudut pandang ini, infrastruktur pendidikan mencakup semua alat fundamental yang secara tidak langsung mendukung pengajaran di kelas. Pemahaman ini menyoroti

²¹Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Revisi (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 2.

²²Bidang DIKBUD KBRI Tokyo, *UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL* (Jakarta, 2003), hal. 14.

karakteristiknya serta sarana prasarana langsung dan tidak langsung yang menopang persiapan pendidikan.²³

Menurut Muhammad Joko Susilo, yang dimaksud dengan “prasarana pendidikan” adalah bangunan-bangunan seperti halaman, kebun, kebun sekolah, dan jalan yang menghubungkan ke sekolah yang secara tidak langsung membantu jalannya pendidikan atau pengajaran. Namun unsur-unsur tersebut dianggap sarana pendidikan apabila digunakan khusus untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk mata pelajaran biologi, taman bermain sekolah atau lapangan olah raga. Bangunan, ruang kelas, meja, dan kursi adalah beberapa contoh fasilitas pendidikan, beserta sumber daya dan media pembelajaran.²⁴

Perangkat yang langsung digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah adalah contoh fasilitas pendidikan, beserta bahan, perabot, dan perlengkapannya. Sementara itu, perangkat dasar yang dapat dilihat di pekarangan, kebun dan taman yang secara tersirat menawarkan bantuan pegangan belajar di sekolah dianggap sebagai prasarana pendidikan.²⁵

Berdasarkan pengertian sarana dan prasarana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa aspek proses pembelajaran baik dalam konteks pendidikan formal maupun nonformal menekankan pada potensi yang dimiliki setiap siswa. Semua peralatan yang digunakan secara tidak

²³Barnaawi dan M Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 47.

²⁴Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 65.

²⁵Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya* (Surabaya: Bumi aksara, 2004), hal. 2.

langsung dalam proses pendidikan disebut “prasarana”, tetapi segala sesuatu yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan, baik yang bersifat mobile maupun tidak, disebut “sarana pendidikan”. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, memfasilitasi kegiatan pembelajaran, dan meningkatkan mutu pendidikan, diperlukan sarana dan prasarana.

Berdasarkan konsep sarana dan prasarana sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur proses pembelajaran tersebut mengedepankan potensi yang dimiliki setiap peserta didik baik di lingkungan pendidikan formal maupun nonformal. Semua peralatan yang digunakan secara tidak langsung dalam proses pendidikan disebut “prasarana”, tetapi segala sesuatu yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan, baik yang bersifat mobile maupun tidak, disebut “sarana pendidikan”. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, memfasilitasi kegiatan pembelajaran, dan meningkatkan mutu pendidikan, diperlukan sarana dan prasarana.

2. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren

Dijelaskan bahwa pendidikan pesantren yang berupa bentuk pengkajian kitab kuning, bentuk dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin dan bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum merupakan bagian dari pendidikan nasional²⁶. Akan tetapi dalam

²⁶ Kemenag, *Peraturan Menteri Agama No.31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren* (JDIH BPK RI, 2020).

penyelenggaraanya didasarkan dengan keikhlasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan pesantren masing-masing²⁷.

Pendidikan yang diselenggarakan pesantren bisa secara pendidikan formal ataupun nonformal. Pendidikan formal pesantren berupa pendidikan diniyyah formal (PDF) dan satuan pendidikan mu'adallah (SPM) yang mana jenjang pendidikanya mulai dari jenjang Ula atau setara SD dan MI, Wustho atau setara SMA dan MTs, dan Ulya atau setara SMA dan MA. Kemudian untuk pendidikan jenjang pendidikan tinggi yang disebut Ma'had Ali. Dan pada jenjang pendidikan tinggi ini santri dimungkinkan untuk meraih gelar sarjana, magister, hingga doctor. Selain itu pendidikan formal pesantren baik pendidikan diniyyah formal (PDF) ataupun satuan pendidikan mu'adallah (SPM) memiliki keunikan tersendiri yaitu mempunyai kebebasan tersendiri dalam penyusunan kurikulum, akan tetapi tetap harus disandarkan atau berbasis kitab kuning. Sedangkan untuk pendidikan nonformal atau biasa disebut madrasah diniyyah takmiliyyah (MDT) dari segi kurikulum tidak jauh beda dengan pendidikan diniyyah formal (PDF)²⁸.

Maka dari itu untuk memenuhi kualitas mutu yang baik harus didasari dengan beberapa standar yang tercantum pada Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 yang salah satunya adalah standar sarana dan prasarana.

²⁷Kemenag.

²⁸Kemenag.

Dalam pemenuhan sarana dan prasarana, ada beberapa aspek kriteria yang harus disusun oleh Masyayih mulai dari aspek daya tamping, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan, yang mana gunanya adalah untuk mendukung proses pembelajaran yang berlangsung. Minimal atau paling sedikitnya sarana dan prasarana yang tertera pada Peraturan Menteri Agama No.31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren pasal 48 yaitu: ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, dan ruang laboratorium, serta prasarana lainnya²⁹. Dalam pemenuhan minimal atau sedikitnya sarana dan prasarana di pondok pesantren, akan dijelaskan pada pembahasan fungsi-fungsi manajemen sarana dan prasarana pada paparan berikut.

3. Fungsi-Fungsi Manajemen Sarana dan Prasarana

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Dalam pembahasan tesis ini, pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada tindakan memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang secara langsung atau tidak langsung mendukung proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam upaya pengendalian prasarana pendidikan yang bermutu dilakukan upaya di bidang pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penggunaan.

²⁹ Kemenag.

Menurut Ibrahim Bafadal, Pengadaan adalah seperangkat operasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang beragam berdasarkan tuntutan pencapaian tujuan pendidikan.³⁰

Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas menyebutkan, tata cara pengadaan barang dan jasa harus mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 dalam bukunya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah. Secara umum, proses pembelian sarana dan prasarana pendidikan di sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana.
- 2) Mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- 3) Membuat proposal kepada pemerintah untuk pembelian sarana dan prasarana sekolah negeri dan yayasan sekolah swasta.
- 4) Jika mereka diterima, mereka akan dilihat untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan persetujuan dari pihak yang dituju.
- 5) Setelah diperiksa dan disetujui, sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana tersebut akan diterima.
- 6) Tergantung pada situasinya, kontrol atas perolehan prasarana dan sarana pendidikan dari sumber internal dan eksternal harus dicatat. Hal ini dilakukan untuk memantau dan mengatur keluar masuknya perlengkapan, perbekalan, serta prasarana dan sarana lainnya milik sekolah. Sebagai pedoman dalam melaksanakan

³⁰Bafadal, hal. 60.

penyelenggaraan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, sekolah dapat menggunakan formulir Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang disediakan dalam bentuk tabel. Struktur ini diikuti di seluruh catatan ini.³¹

Menurut penilaian sebelumnya, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan yang dapat dilacak dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis fasilitas pendidikan. Ada berbagai cara untuk memperoleh prasarana pendidikan, antara lain dengan pembuatan sendiri, pembelian, peminjaman, penyewaan, pemberian atau bantuan, penukaran, pendaurulangan, dan perbaikan atau rekondisi.

Pembuatan sendiri yaitu suatu metode pemenuhan sarana dan prasarana yang melibatkan anggota yang ada di dalam lembaga yang dilakukan dengan membuat bahan atau barang sendiri dan juga biasanya dilakukan pada sarana dan prasarana yang bersifat sederhana atau murah.

Pembelian yaitu metode pemenuhan sarana dan prasarana baik di lingkup sekolah, instansi, organisasi ataupun lembaga lainnya dengan cara membayarkan sejumlah uang kepada penjual untuk

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Persekolahan Berbasis Sekolah* (Jakarta, 2007), hal. 17.

mendapatkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Peminjaman yaitu penggunaan sarana dan prasarana secara cuma-cuma dari pihak lain guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana suatu lembaga dengan penjanjian pinjam-meminjam.

Penyewaan pemenuhan sarana dan prasarana dari pihak lain dengan cara membayar yang sesuai dengan ketentuan sewa-menyewa.

Pemberian atau bantuan yaitu pemenuhan sarana dan prasarana yang dilakukan dengan cara menerima pemberian atau bantuan secara cuma-cuma, akan tetapi ada juga dengan cara pembuatan proposal.

Penukaran yaitu pemenuhan sarana dan prasarana dengan cara tukar-menukan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan pihak lain sesuai kebutuhan yang diinginkan.

Pendaaurulangan yaitu pemenuhan sarana dan prasarana dengan cara pemanfaatan barang yang sudah tidak digunakan lagi.

Perbaikan atau rekondisi yaitu pemenuhan sarana dan prasarana dengan cara melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang sudah mengalami kerusakan.

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana mengacu pada tindakan-tindakan yang diambil untuk memastikan agar prasarana pendidikan

tetap berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat digunakan secara teratur. Pengaturan harus dilakukan untuk menjamin bahwa semua prasarana dan sarana pendidikan dalam keadaan baik dan siap digunakan secara efektif dan efisien untuk tujuan pendidikan di masa depan.³²

Menurut Barnawi dan M. Arifin, tahapan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Gugus Tugas Rencana Kerja Sekolah (KK-RKS) harus diundang, dan kepala sekolah harus membentuk tim kecil untuk memulai pengenalan tentang pentingnya menjaga infrastruktur dan fasilitas sekolah. Kepala sekolah dan tim kecil yang baru dibentuk kemudian membuat pedoman pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
- 2) Tugas selanjutnya menyusun program pengenalan dan penyadaran pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
- 3) Pemahaman, diberikan kepada *stakeholder* dengan menggambarkan pemeliharaan program sekolah. Manfaat pemeliharaan, maksud dan tujuan, keterkaitan antara pemeliharaan dan pengelolaan aset sekolah, berbagai jenis pemeliharaan dan ruang lingkupnya, serta partisipasi semua pemangku kepentingan, semuanya tercakup dalam program pemeliharaan.
- 4) Siapa yang memegang kendali, siapa yang melakukannya, dan siapa yang memantau organisasi pada tahap ini sangat jelas terlihat. Anggota organisasi pengelola pemeliharaan meliputi administrator, guru, siswa, komite sekolah, dan staf pemeliharaan teknis.

³²Departemen Pendidikan Nasional, hal. 31.

- 5) Pelaksanaan, terbagi atas pemeliharaan rutin dan berkala.
- 6) Dengan menginventarisasi infrastruktur dan layanan sekolah berdasarkan ketersediaan dan kondisinya, data dikumpulkan.³³

Berdasarkan kutipan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan harus melalui tahapan pengorganisasian, pengembangan program pemeliharaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pendataan sarana dan prasarana yang telah selesai, dan sekaligus pencatatan sarana dan prasarana pendidikan. kondisi barang yang dapat dirakit pada tahap inventarisasi.

Untuk menunjang pembelajaran, gerakan yang dinamakan “pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan” bertujuan agar sarana dan prasarana yang ada saat ini tetap dalam kondisi prima dan selalu siap pakai. Bergantung pada jangka waktu, masa pakai produk yang direncanakan, dukungan yang terkait dengan penggunaan dan kondisi produk, upaya perawatan yang berbeda akan diperlukan.

Bentuk pemeliharaan sarana dan prasarana ada yang secara rutin, berkala, darurat, dan preventif. Pemeliharaan rutin yaitu pemeliharaan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap sarana dan prasarana. Pemeliharaan berkala yaitu bentuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang mana dilakukan secara berkala yang terdapat jadwal khusus dalam pelaksanaannya. Pemeliharaan darurat

³³Barna wi dan Arifin, hal. 229.

yaitu suatu bentuk pemeliharaan sarana dan prasarana dengan cara mendadak ketika terjadi kerusakan sarana dan prasarana secara tidak terduga dan bersifat merugikan jika tidak segera diperbaiki. Pemeliharaan preventif yaitu bentuk pemeliharaan yang dilakukan pada waktu tertentu yang mana umumnya dilakukan pada saat sebelum sarana dan prasarana mengalami kerusakan³⁴.

Pembagian upaya pemeliharaan sarana dan prasarana yaitu berdasarkan kurun waktu, berdasarkan umur penggunaan barang, berdasarkan penggunaan barang, dan berdasarkan keadaan barang. Pemeliharaan sarana dan prasarana berdasarkan kurun waktu seperti pemeliharaan sehari-hari, mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Pemeliharaan sarana dan prasarana berdasarkan umur penggunaan barang dilihat dari dua aspek yaitu usia barang secara fisik dan usia barang secara administratif. Pemeliharaan sarana dan prasarana berdasarkan penggunaan barang seperti penggunaan barang sebagaimana mestinya. Pemeliharaan berdasarkan keadaan barang dilakukan terhadap barang habis pakai dan barang tidak habis pakai³⁵.

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pemeliharaan sarana dan prasarana yaitu tenaga kerja atau tenaga sukarela, alat dan bahan, jenis atau spesifikasi barang meliputi pemeliharaan barang secara rutin dan secara berkala.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional.

c. Inventarisasi Sarana dan Prasarana

Inventarisasi adalah daftar yang sistematis, teratur, dan teratur dari setiap perlengkapan pendidikan yang dimiliki sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Menurut B. Suryosubroto, pencatatan fasilitas pendidikan merupakan kegiatan administrasi, yang memerlukan penyediaan perangkat administrasi seperti:

- 1) Buku inventarisasi. Daftar inventarisasi barang-barang yang dimiliki negara dan yang diperoleh negara dari sumber lain dimasukkan dalam buku inventarisasi.
- 2) Buku Pembelian: Buku ini berisi daftar barang yang dibeli atau yang akan dibeli.
- 3) Buku penghapusan berbicara tentang cara menyingkirkan barang yang rusak, tidak berguna lagi, atau yang baik tetapi tidak diperlukan.
- 4) Kartu barang. Untuk menentukan jumlah barang untuk kondisi setiap bulan, kuartal, tahun dan tahun ke tahun, diperlukan lembar barang.³⁷

Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan, menurut uraian di atas, merupakan catatan rinci tentang semua aset sekolah yang dikuasai dan diawasi untuk memudahkan pelaporan sarana dan prasarana pendidikan. Buku hapus buku, kartu barang, buku inventaris, dan buku pembelian adalah semua bentuk administrasi inventaris yang perlu dilengkapi dalam rangka perbaikan

³⁶Bafadal, hal. 55.

³⁷B Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 123.

pengelolaannya. Sarana dan prasarana juga harus diberi kode dan dikategorikan agar informasi lebih mudah ditemukan.

Klasifikasi dan pengkodean barang pada dasarnya dimaksudkan dengan tujuan agar cukup mudah dan efisien untuk mencatat, mencari dan menemukan sarana dan prasarana tertentu baik secara fisik maupun melalui daftar inventaris sarana dan prasarana. Sesuai dengan tujuan tersebut maka klasifikasi bisa dengan menggunakan lambang, sandi, atau kode barang yang digunakan sebagai pengganti nama barang.

Kemudian yang harus diperhatikan lagi yaitu pelaporan inventaris. Dalam hal ini ada beberapa bentuk pelaporan yaitu laporan triwulan dan laporan tahunan.

Tujuan dilakukannya inventarisasi adalah dalam rangka pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki pendidikan. Secara khusus, inventarisasi dilakukan dengan tujuan menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana, menghemat keuangan dalam pengadaan maupun pemeliharaan, pedoman untuk menghitung aset yang dimiliki, dan memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki³⁸.

d. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Untuk mencapai tujuan pendidikan, pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan berpedoman pada dua prinsip, yaitu:

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional.

- a. Prinsip keefektifan menyatakan bahwa setiap perangkat pembelajaran yang digunakan di sekolah harus menunjukkan kegunaannya semata-mata untuk tujuan pendidikan selanjutnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Prinsip efisiensi yaitu untuk mencegah kerusakan, kehilangan, atau habisnya perlengkapan pendidikan dengan cepat, penting untuk menggunakan semua perlengkapan dengan hati-hati dan bijaksana.

Merupakan tugas kepala sekolah untuk memanfaatkan sarana dan prasarana di semua jenjang pendidikan. Penyelenggara sekolah membuat jadwal dengan bantuan pejabat dari departemen sarana dan prasarana untuk memastikan keberhasilan acara ini. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan sarana dan prasarana:

- a. Penyusunan jadwal harus menghindari benturan dengan kelompok lain.
- b. Memberikan kepentingan tinggi untuk kegiatan inti sekolah.
- c. Hanya pada awal tahun ajaran waktu atau jadwal penggunaan dilaporkan.
- d. Penugasan/penunjukan personel sesuai dengan keahlian pada bidangnya.
- e. Perlu adanya penjadwalan penggunaan sarana dan prasarana sekolah yang jelas antara kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Berikut adalah penggolongan sarana pendidikan yang disediakan dengan maksud untuk mempercepat proses belajar mengajar:

- a. Sumber daya pendidikan meliputi alat pelajaran, alat peraga, dan media pendidikan yang secara khusus digunakan dalam proses belajar mengajar.
- b. Prasarana pendidikan meliputi gedung, peralatan kantor, kamar kecil, dan barang-barang lainnya yang tidak tampak jelas pada saat proses belajar mengajar.

Faktor-faktor berikut berdampak pada bagaimana pemanfaatan sarana pendidikan diatur:

- a. Banyaknya sarana pendidikan
- b. Banyaknya kelas masing-masing tingkat
- c. Banyaknya siswa dalam tiap-tiap kelas
- d. Banyaknya ruang atau kelas yang ada di sekolah
- e. Banyaknya guru atau karyawan yang terlihat dalam penggunaan sarana pendidikan.³⁹

Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh suatu lembaga dalam pemanfaatan sarana dan prasarana yaitu tujuan yang akan dicapai, kesesuaian sarana dan prasarana dengan tujuan lembaga, tersedianya sarana dan prasarana penunjang, dan keahlian pengguna sarana dan prasarana.

³⁹Irjus Indrawan, *Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), hal. 38.

B. Peningkatan Mutu Pendidikan

1. Mutu Pendidikan

Berikut ini beberapa pandangan para ahli tentang mutu:

Menurut Joseph M. Juran mutu ialah (*fitness for use*) kesesuaian untuk penggunaan⁴⁰. Suatu barang dikatakan bermutu bilamana barang tersebut dianggap sesuai dengan tujuan konsumen terhadap penggunaan barang. Semisal ada tiga orang membutuhkan *handphone* dengan kebutuhan orang pertama membutuhkan mesin bagus, orang kedua membutuhkan kamera bagus, dan orang ketiga membutuhkan layar yang bagus, maka produsen harus membuat satu *handphone* dengan mesin bagus, kamera bagus dan layar bagus.

Menurut W. Edward Deming mutu ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen⁴¹. Suatu barang dikatakan bermutu bilamana barang tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar atau konsumen. Semisal ada tiga orang membutuhkan *handphone* dengan kebutuhan orang pertama dan kedua membutuhkan kamera bagus, dan orang ketiga membutuhkan layar bagus, maka produsen harus mengeluarkan *handphone* dengan kualitas kamera bagus karena mayoritas kebutuhan pasar adalah kamera bagus.

⁴⁰ Asmuni, "Konsep Mutu Dan Total Quality Manajemen (TQM) dalam Dunia Pendidikan," *Ta'dib*, XVIII.01 (2013), hal. 20.

⁴¹ Asmuni, hal. 20.

Menurut Edward Sallis mutu ditinjau dari sudut konsumen yaitu sesuatu yang memuaskan dan melampaui kebutuhan⁴². Suatu barang dikatakan bermutu bilamana barang tersebut memuaskan pelanggan bahkan melampaui kepuasan pelanggan. Semisal ada orang membutuhkan *handphone* dengan kamera yang bagus, maka produsen akan memberikan *handphone* dengan kualitas kamera yang terbaik.

Istilah “*input*”, “*proses*”, dan “*output*” semuanya digunakan untuk menggambarkan mutu pendidikan bersama-sama dengan sumber daya selebihnya seperti uang, bahan, peralatan, dan sebagainya. Sedangkan struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, uraian tugas, rencana, dan program antara lain dimasukkan ke dalam *input* perangkat lunak yang dimaksud dalam penelitian ini. Akibatnya, tingkat kesiapan masukan dapat digunakan untuk menentukan tinggi atau rendahnya kualitas suatu masukan. *Input* kelembagaan yang tersedia sebanding dengan tingkat persiapan untuk *input* tersebut.

Satu hal menjadi hal lain melalui proses pendidikan. terlepas dari kenyataan bahwa keluaran atau hasil dari proses juga disebut hasil, yang mempengaruhi operasi proses yang berkelanjutan. Siklus tersebut adalah metode pemilihan yang paling sering, metode pengelolaan yayasan yang paling sering, administrasi program pelaksana, pengalaman mendidik dan menumbuhkan, serta pengamatan dan evaluasi proses, selama pengalaman mengajar dan mendidik memiliki tingkat signifikansi

⁴² Edward Sallis, *Total Quality Management in Education (Model, Teknik, dan Implementasinya)* (Yogyakarta: Ircisod, 2015), hal. 56.

berbeda yang paling menonjol diantara beberapa siklus. Lanjutan langkah tambahan jika instruktur, siswa, kurikulum, dan elemen pendukung lainnya bekerja sama untuk menghasilkan lingkungan belajar yang menyenangkan yang dapat memotivasi siswa untuk terlibat dalam pembelajaran dan benar-benar mampu, proses tersebut dianggap berkualitas tinggi. menginstruksikan siswa.

Kinerja kepala sekolah merupakan *output* dari pendidikan. Pencapaian sekolah secara keseluruhan disebut sebagai kinerjanya. Selama proses di lembaga pendidikan, kinerja sekolah dapat diukur dari kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerja. Berkaitan dengan kualitas *output* dapat dijelaskan bahwa *output* suatu sekolah dapat dikatakan berkualitas apabila siswa menunjukkan prestasi akademik yang tinggi baik berupa nilai, karya ilmiah, dan lomba akademik, maupun non akademik. prestasi seperti iman dan takwa. Hal ini terutama berlaku untuk prestasi belajar. kejujuran, kesopanan, olahraga, seni, keterampilan, dan kegiatan lain di luar sekolah.⁴³

Manajemen yang berfokus pada mutu menekankan kepuasan pelanggan dan karyawan, melibatkan setiap departemen dan karyawan dalam upaya peningkatan kualitas, dan menempatkan kualitas di garis depan strategi bisnis. Menurut sudut pandang yang disajikan di atas, manajemen peningkatan kualitas adalah filosofi metodologis yang

⁴³Richard L. Daft, *Management*, 12 ed. (Boston: Cengage Learning, 2016), hal. 8.

membantu berbagai institusi, khususnya sektor bisnis, dalam mengelola perubahan dan menetapkan agenda masing-masing dalam menanggapi tekanan eksternal.

Akibatnya, manajemen peningkatan kualitas pendidikan dapat diidentifikasi sebagai “memprioritaskan siswa”, “program peningkatan siswa”, atau “program peningkatan sekolah”, tergantung bagaimana penerapannya. Fakta bahwa peningkatan kualitas program dapat mengubah budaya sekolah adalah hal yang paling penting untuk ditekankan. Pelajar dan wali dapat lebih terinspirasi oleh kemajuan yang dicapai oleh manajemen kualitas yang terkoordinasi melalui berbagai program peningkatan kualitas.

Fungsi penting adalah evaluasi konsistensi tawaran pendidikan. Standar mutu pendidikan dapat digunakan untuk merujuk pada standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan sebagai persyaratan dasar bagi sistem pendidikan nasional Indonesia. Persyaratan ini meliputi:

- a. standar kompetensi kelulusan,
- b. standar isi,
- c. standar pendidik dan tenaga kependidikan,
- d. standar proses,
- e. standar sarana dan prasarana,
- f. standar pembiayaan,
- g. standar pengelolaan dan
- h. standar penilaian pendidikan.

Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar untuk mengatur, melaksanakan, dan mengatur operasional pendidikan untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas tinggi. Tujuan standar pendidikan nasional adalah untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan meningkatkan kehidupan bangsa dan mengembangkan karakter dan peradabannya.

Dalam upaya meningkatkan taraf pendidikan ditekankan pentingnya sekolah sebagai aktor otonom utama, serta peran orang tua dan masyarakat dalam meningkatkan hasil pendidikan. Sekolah harus diberikan dukungan dan kepercayaan untuk mengelola dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan lingkungannya. Untuk memenuhi tujuan pengajarannya, sekolah memiliki pilihan untuk mengelola prosedur tata kelola kelembagaan sebagai entitas mandiri.⁴⁴

Sebagai hasil dari gaya berpikir ini, manajemen mutu berbasis sekolah (*school-based quality management*) adalah strategi baru untuk mengelola peningkatan mutu berbasis sekolah⁴⁵. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas tentunya menjadi tujuan utama setiap lembaga pendidikan. Sifat ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan telah berhasil memenuhi perannya sebagai dunia usaha dan sebagai lembaga pendidikan di masyarakat.

Institusi dan organisasi dianggap berhasil ketika tingkat kelangsungan hidup dan efektivitasnya meningkat. Ini mengikuti secara

⁴⁴Soebagio Atmodiwirio, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Ardadizya Jaya, 2000), hal. 5–6.

⁴⁵Suryosubroto, hal. 204.

logis pandangan konsumen, atau masyarakat umum, terhadap klien internal dan eksternal organisasi. Agar lembaga mana pun berhasil (efektif), perlu memiliki rencana yang kuat dan terdefinisi dengan baik untuk mengatasi lingkungan dan persaingan yang berfokus pada kaliber hasil pendidikan.

Jenjang pendidikan yang telah dibakukan untuk sistem pendidikan telah ditetapkan melalui prakarsa pendidikan berdasarkan penilaian mutu. Mekanisme yang mengontrol input dan output pendidikan merupakan penekanan utama pendidikan yang berkualitas. Ada tiga faktor yang dapat meningkatkan taraf pendidikan: (1) kualitas sumber daya pendidikan, seperti tenaga pengajar, biaya, dan fasilitas belajar; (2) efektivitas lingkungan belajar mengajar; dan (3) kualitas pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang dihasilkan dari proses pendidikan.⁴⁶

Siswa, guru, kurikulum, keuangan, dan sarana dan prasarana adalah komponen lain yang memiliki pengaruh yang lebih besar pada peningkatan kualitas pendidikan. Pemimpin lembaga pendidikan, seperti kepala sekolah atau administrator, harus mempertimbangkan kualitas komponen ini.⁴⁷

Jika ingin terselenggaranya pendidikan bermutu, peran kepala sekolah sangat menentukan, namun tidak dapat berfungsi tanpa dukungan pihak lain. Partisipasi dari semua pihak sangat diperlukan. Artinya, agar

⁴⁶Fatah, hal. 25.

⁴⁷Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam* (Malang: PT. Erlangga, 2007), hal. 205.

pelopor dan bawahan dapat menuntaskan sekolah bermutu secara sinergis, harus ada korespondensi atau komunikasi.

Implementasi gagasan pengelolaan peningkatan mutu pengajaran di bidang pendidikan mengandung arti berusaha untuk fokus pada manajemen kemahasiswaan yang secara nyata mengangkat derajat lulusan atau lembaga. Tentu saja, harus ada upaya terkoordinasi untuk meningkatkan budaya sekolah, dan tindakan kepemimpinan adalah langkah pertama.

Menerapkan pendekatan ilmiah saat memeriksa data sangat penting untuk menemukan solusi atas masalah peningkatan kualitas. Komitmen seluruh komponen organisasi dalam hal ini komponen pendidikan dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mencapai motivasi yang tinggi dan bertindak untuk memenuhi tujuan kepuasan pelanggan atau masyarakat. Kesimpulan: Dapat dikatakan bahwa hipotesis ilmu manajerial manajemen mutu pendidikan secara tegas mendorong pimpinan organisasi atau lembaga pendidikan beserta pegawainya untuk menerapkan program peningkatan mutu berkelanjutan yang berfokus pada memperoleh asumsi dari pelanggan atau komunitas lokal.

Peningkatan mutu pengajaran dalam pengertian konsep mutu ini mengacu pada kerja sistematis sekolah di bawah arahan kepala sekolah, yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pengajaran untuk meningkatkan kepuasan. pengguna prestasi sekolah adalah orang tua dan siswa itu sendiri.

Karena kepala sekolah yang kompeten, visioner, dan kredibel memiliki ide dan kreativitas untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah yang dipimpinnya, maka menentukan visi kepala sekolah merupakan langkah awal untuk mewujudkan hal tersebut. Kemampuan staf pamer diperluas, penyegaran rencana pendidikan, mutu dan jumlah dinas dan yayasan ditingkatkan, dan partisipasi musyawarah sekolah dalam kontribusinya dalam memupuk sifat pamer di setiap sekolah akan dibentengi.

Kapasitas lembaga pendidikan untuk memanfaatkan sumber daya pendidikan secara paling efisien untuk meningkatkan kemampuan belajar disebut sebagai acuan mutu pendidikan.⁴⁸

Mulyasa mengutip pernyataan yang terdapat pada Depdiknas bahwa kontribusi, proses, dan hasil pendidikan semuanya termasuk dalam konsep mutu⁴⁹. Saat ini, kualitas adalah prioritas untuk semua lembaga pendidikan. Apabila masukan, proses, dan keluarannya dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa pendidikan serta harapan masyarakat, maka lembaga pendidikan dianggap “bermutu”.

Lembaga pendidikan baru dikatakan unggul jika kinerjanya memenuhi atau melebihi kebutuhan pemangku kepentingan (pengguna). Karena persyaratan kualitas klien administrasi terus berubah dan

⁴⁸Atmodiwirio, hal. 161.

⁴⁹Enco Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, 11 ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 116.

berkembang, konsep nilai juga unik, berkembang, dan masuk akal di bawah kondisi persaingan yang konsisten.⁵⁰

2. Mutu Pendidikan Pesantren

Dalam membahas mutu pendidikan pesantren secara umum ada dua teori tentang pencapaian mutu pendidikan pesantren. Teori pertama yaitu yang menjelaskan bahwa mutu pendidikan pesantren itu sangat dipengaruhi oleh faktor *input*. Yang dimaksud faktor *input* yaitu kurikulum, perencanaan, evaluasi, tenaga pengajar (ustadz), siswa (santri), sarana dan prasarana, iklim pesantren, dan hubungan pesantren dengan masyarakat. Teori yang kedua yaitu teori yang mengatakan bahwa mutu pendidikan pesantren itu didasarkan pada proses pengelolaan lembaga, proses pengelolaan program, proses pengambilan keputusan, proses pembelajaran, dan proses evaluasi⁵¹.

Untuk mencapai pendidikan pesantren sesuai dengan dua teori tersebut di atas, maka pesantren harus menekankan secara keseluruhan terhadap proses pendidikan. Dalam hal ini maka perlu kiranya pihak pengelola pesantren untuk lebih menekankan pendeteksian, pengukuran, dan penilaian terhadap standar-standar yang dimiliki, sistem, juga sivitas pendidikan pesantren⁵². Setiap sivitas pesantren diharapkan secara baik untuk menciptakan kualitas atau mutu pendidikan yang baik. Artinya manajemen pesantren untuk berusaha menjadikan setiap komponen

⁵⁰Atmodiwirio, hal. 161.

⁵¹Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Konsep Dasar, Buku 1* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2002), hal. 22–25.

⁵² Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan, Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 44.

pesantren menjadi berkualitas secara menyeluruh baik mulai dari pengadaan maupun sampai hasil akhir

“Apabila manajemen mempunyai dan memegang teguh komitmennya, kemungkinan besar mereka akan berhasil. Komitmen ini setidaknya meliputi tiga hal, yaitu waktu, antusias (*enthusiasm*), dan sumber daya (*resource*) dalam organisasi.”⁵³

Komitmen waktu yang dimaksud yaitu harapan besar bagi pengelola pesantren untuk mempertimbangkan jumlah waktu yang digunakan secara aktif untuk melaksanakan program-program pendidikan pesantren yang telah disusun. Komitmen antusias yang dimaksud yaitu semangat juang pengelola pesantren dalam melaksanakan program-program pendidikan pesantren yang ada. Komitmen sumber daya yang dimaksud yaitu suatu nilai potensi yang ada atau yang dimiliki untuk dipergunakan semaksimal mungkin dan memenuhi kebutuhan pendidikan pesantren.

3. Manajemen Mutu dalam Prespektif Islam

Al-Qur'an menunjukkan betapa pentingnya pendidikan. Jika Anda mempelajarinya lebih jauh, Anda akan menemukan bahwa dimungkinkan untuk mengidentifikasi konsep pendidikan dasar tertentu, yang dapat menjadi dasar untuk inovasi di masa depan dan penciptaan pendidikan berkualitas tinggi. Menurut Ramayulis, pengaturan (*at-tadbir*) memiliki pengertian yang sama dengan inti manajemen.⁵⁴ Kata ini merupakan

⁵³Nanang Fattah, *Konsep Manajemen, MBS dan Dewan Sekolah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2006), hal. 125.

⁵⁴Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, 5 ed. (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hal. 43.

induksi dari kata *dabbara* (mengatur)⁵⁵ yang sering disebutkan Al-Qur'an seperti firman Allah SWT:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ

أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu” (Al Sajdah: 05)⁵⁶.

Ayat di atas menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Allah SWT adalah pengatur atau pengelola alam. Namun, karena Allah SWT menciptakan manusia yang kini menjadi khalifah di Bumi, Dia harus mengelola planet ini seefektif mungkin, sebagaimana Allah mengatur alam semesta.

Menurut ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan dengan baik, benar, rapi dan teratur. Proses harus diikuti dengan benar dan dapat dilakukan dengan sembrono. Dari hal terkecil seperti perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pemantauan, hingga evaluasi penggunaan sumber daya yang ada, semua itu memerlukan koordinasi yang baik, tepat dan terarah dalam kerangka pengelolaan, agar tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai dan akan menjadi efisien dan efektif.

Allah SWT dalam al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 berfirman:

⁵⁵Imam Abi al Fida Ismail Ibnu Katsir Al Qurasyi Ad Dimsyaqi, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4: Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (Beirut: Al-Kitab Al Ilmi, 2007), hal. 743.

⁵⁶Qur'an Kemenag, *QS. As-Sajdah/32:5*.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”⁵⁷.

Dalam Tafsir Al-Hawi'ala Al-Jalalain, kalimat “Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada manusia” (*innallaha la yughayyiru ma biqaum*) diterjemahkan dengan “tidak mengambil nikmat-Nya” (*yaslubuhum ni'matahu*). Sebaliknya, ayat hatta yughayyiru ma bianfusihim menunjukkan *minal khalatil jamilati bil ma'shiyati* (dari baik dan terpuji menjadi tidak bermoral), kecuali mereka mengubah komponennya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan)

⁵⁷Qur'an Kemenag, *Ar-Ra'd/13:11*.

terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (Al Baqoroh: 267)⁵⁸.

Konsep mutu pada penjelasan ayat tersebut yaitu pada kata *min thoyyibati maa*, bahwasanya berdasarkan ayat tersebut dapat diambil bahwa perintah Allah SWT. nyata pada kata *anfiqiw* yang merupakan *fi'il amar* dengan *waqi' jama' mudzakar* dengan kaidah setiap ada *jama'* yang terdiri dari *mudzakar* dan *mu'annas* maka dicukupkan menggunakan *jama' mudzakar*, maka perintah terhadap pengelola pendidikan baik laki-laki ataupun perempuan untuk memberikan sesuatu yang baik bahkan yang terbaik terhadap siswa dari segi kinerja (diambil dari kata *kasabtum*) dan kompetensi (diambil dari kata *mimmaa akhrojnaa lakum*).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ

Artinya: “engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga engkau menafaqohkan dari apa yang engkau cintai, dan apa yang telah engkau nafaqohkan sesungguhnya Allah SWT. Maha Mengetahui.”⁵⁹

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa konsep mutu diambil dari kata *al birro* dan *mimmaa tuhibbuun*, bahwa jika pengelola pendidikan menginginkan hasil atau *output* pendidikan yang baik, maka

⁵⁸ Qur'an Kemenag, *Qs. Al-Baqoroh/2:267*.

⁵⁹ Qur'an Kemenag, *QS. Ali Imron/3:92*.

harus memberikan yang paling terbaik pula (*mimma tuhibbun* diambil yang paling terbaik).

Konsep manajemen pendidikan Islam adalah cara yang paling umum untuk mengatur atau mengawasi lembaga pendidikan Islam dengan memanfaatkan setiap aset yang dapat diakses (Muslim, yayasan pendidikan atau lainnya), baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui kerjasama yang bermanfaat, efektif dan efisien dengan individu lain untuk mencapai kesenangan dan kekayaan di dunia dan akhirat.

Nama *at-Ta'lim*, *at-Tarbiyyah*, dan *at-Tadhib* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, tetapi kata *rabbi* adalah yang paling sering kita lihat. *At-Ta'lim* adalah jenis *masdar* dari *fi'il madzi rabba*, dan memiliki arti yang sama dengan *rabb*, yang menunjukkan nama Allah. Meskipun kata "*at-Tarbiyyah*" tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, sinonim yang mirip antara lain *ar-rabb*, *rabbyani*, *murobbi*, *rabbiyun*, dan *Rabbani*. Dalam Islam, kata "pendidikan" diyakini berasal dari bahasa Arab, tepatnya dari kata "*tarbiyah*" yang berbeda dengan kata "*ta'lim*" yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi "*teaching*" atau "mengajar". Istilah "*tarbiyah*" dan "*ta'lim*" yang merujuk pada pembentukan tingkah laku atau tingkah laku yang diperuntukkan bagi manusia, juga berbeda dengan istilah "*ta'dzib*".⁶⁰

⁶⁰Rusli Karim, *Pendidikan Islam antara Fakta dan Cita* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hal. 67.

Kata-kata sebelumnya ditafsirkan secara berbeda oleh beberapa Ahli Tafsir. Menurut Ahmad Tafsir, arti kata “*Tarbiyah*” adalah pendidikan. Kata tersebut berasal dari frasa “*rabba-yarbu*”, “*rabbīya-yarbaa*” dan “*rabba-yarubbu*”, yang masing-masing berarti “memperbaiki”, “mengendalikan”, “membimbing”, “memelihara”, dan “memelihara”. *Rabba-yarbu* berarti “meningkatkan, menumbuhkan”, “*rabbīya-yarbaa*”, “menjadi hebat” dan “mempertahankan”.⁶¹

Melalui pendidikan, yang merupakan upaya yang direncanakan dan disengaja untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, peserta didik secara aktif mengembangkan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk diri mereka sendiri, bangsa mereka, dan negara bagian mereka.

Penulis menyimpulkan bahwa konsep pendidikan Islam adalah suatu proses perubahan dan asimilasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam dalam diri peserta didik melalui pengembangan dan pembinaan potensi dirinya secara teratur untuk mencapai keseimbangan dan kepuasan hidup secara umum. Kesimpulan ini didasarkan pada berbagai definisi yang diberikan di atas baik sudut pandang maupun aspek. Berikut agar institusi pendidikan Islam direorganisasi sehingga kurikulumnya berpusat pada pelatihan keterampilan tertentu:

⁶¹Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thobari, *Jami'ul Bayan 'An Ta'wil Ayi al-Qur'an jilid 1* (Palembang: CV. Pustaka Azzam, 2008), hal. 89.

- a. Beragam program, banyak strata, dan berorientasi pada tujuan, sudut pandang dan persyaratan deskriptif.
- b. Konsep mengintegrasikan kompetensi kognitif, afektif, dan moral digunakan untuk menyusun setiap program.
- c. Keanekaragaman program dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang benar-benar ada, dan menitikberatkan pada bagaimana siswa yang memiliki rasa tanggung jawab berperilaku.

C. Pondok Pesantren

1. Pengertian Pondok Pesantren

Menurut dari bahasa, istilah "Pondok" yang berarti tempat tinggal sederhana dan aman ini berasal dari bahasa Jawa. Asrama Pondok adalah tempat tinggal yang terpisah-pisah untuk santri yang berkonsentrasi pada ajaran dasar Islam dari Al-Qur'an, Hadits, dan Salaf (kitab kuning), di bawah bimbingan seorang kyai yang setia dan sangat sabar. Di kabin ini, siswa tinggal, mandi, memperoleh keterampilan baru, membangkitkan rasa ingin tahu, dan berbaur. Siswa dilatih untuk mandiri di banyak pesantren dengan bekerja di lingkungan sekitar sambil menghadiri kelas untuk mendukung ekonomi lokal dan memastikan kelangsungan akademik.

Kata sansekerta "pesantren" berasal dari kata "san", yang berarti "orang yang baik", dan "tra", yang berarti "orang yang suka menolong". Selain itu, kata "santri" berasal dari kata "pesantren", yang

memiliki awalan “pe” dan akhiran “an”, dan mengacu pada lokasi tempat tinggal santri. Demikian pula, pesantren adalah sebuah kompleks yang biasanya terisolasi dari dunia luar. Ada beberapa bangunan tempat tinggal yang ditempati juru kunci di dalam kompleks. Istilah “pesantren” juga dapat diterjemahkan sebagai “santri”, yang mengacu pada orang yang mempelajari agama Islam.

Jika Anda memahami arti kata “pesantren”, itu menunjukkan kecenderungan alami orang untuk mengikuti institusi pendidikan Islam yang dipimpin oleh kyai atau ulama, yang memprioritaskan pelajaran agama dibandingkan dengan metode pendidikan umum lainnya. Definisi Drs. Abu Ahmadi dalam pengertian pondok pesantren adalah sebagai berikut:

“Istilah pesantren mengacu pada suatu program pendidikan bersama yang secara khusus berfokus pada pendidikan agama dan topik tertentu. Lembaga-lembaga ini termasuk hadits, ilmu kalam, fiqh, dan ilmu tasawuf, dan kadang-kadang juga mencakup ruang gerak yang luas.”⁶²

2. Unsur-Unsur Pondok Pesantren

Ada lima komponen utama dalam pesantren, yaitu sebagai berikut:

a. Kyai/Nyai

⁶²Yasmadi, *Modernisasi Pesantren, Kritik Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, 1 ed. (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 61–62.

Di dunia pesantren, Kyai/Nyai memainkan peran yang sangat penting. Dia memimpin kehidupan pondok pesantren secara keseluruhan dan spiritual. Dengan berbagai metode, Kyai/Nyai mengajarkan kitab kuning Islam klasik. Masyarakat memberikan gelar Kyai/Nyai kepada orang-orang yang memimpin atau mengasuh pondok pesantren, mengajarkan kitab-kitab klasik, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang Islam.

Kyai atau Nyai adalah pemimpin spiritual dan non-resmi yang sangat dekat dengan kelompok masyarakat kelas bawah di desa-desa. Dalam peran mereka sebagai tokoh masyarakat, Kyai atau Nyai memiliki massa dan jamaah yang diikat oleh hubungan budaya dan masyarakat yang kuat. Dia selalu mendengarkan, mengikuti, dan menerapkan ajarannya kepada jamaah, komunitas, dan massa yang dipimpinnya. Kyai atau Nyai dianggap sebagai sesepuh atau ibu atau bapak masyarakat, terutama di masyarakat desa.⁶³

b. Santri

Santri adalah orang atau kelompok santri yang bersekolah di pesantren. Pertumbuhan pesantren biasanya diukur dari jumlah dan kualitas santrinya. Ada dua jenis santri yang terdaftar di pesantren.

- 1) Santri murni atau santri mukim adalah santri yang tinggal di pondok dan menerima bekal yang telah disiapkan oleh keluarganya. Kecuali mereka yang yatim piatu atau tidak

⁶³Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 29.

mampu, mereka tinggal di pondok pesantren, tetapi semua kebutuhannya berasal dari pesantren atau orang yang dermawan.

- 2) Santri pulang-pergi atau santri nduduk adalah santri yang mengikuti kegiatan belajar di pondok pesantren tetapi tidak menetap atau tinggal di sana. Santri nduduk biasanya berasal dari masyarakat di sekitar pondok pesantren.

c. Pondok

Dari bahasa Jawa, kata “Pondok” berarti “tempat tinggal yang sangat sederhana”. Di bawah arahan seorang kyai yang saleh, para santri di Pondok tinggal dan belajar bersama di sebuah gedung asrama. Mereka mempelajari Islam secara integral dari kitab-kitab Al-Qur'an, Hadits, dan Salaf (kitab kuning). Para siswa tinggal, mencuci, mempelajari keterampilan baru, membangkitkan minat, dan bersosialisasi di pondok ini. Di beberapa pesantren, santri diajarkan untuk mandiri dengan bekerja di tengah masyarakat sambil belajar untuk menopang ekonomi dan menjamin kelangsungan pendidikan.⁶⁴

d. Masjid

Masjid dapat dianggap sebagai tempat mengajarkan Al-Qur'an, Hadits, dan ilmu Islam, terutama yang berkaitan dengan Islam, mengajarkan santri bagaimana melakukan ibadah, dan melakukan kegiatan kerohanian sehari-hari. Masjid adalah bagian

⁶⁴Yasmadi, hal. 61.

penting dan utama dari suatu tempat. komunitas dan siswa. Masjid di pondok pesantren tidak hanya digunakan untuk salat dan ibadah maktubah (fardu) secara historis dan praktis. Umat Islam telah menggunakan masjid sebagai tempat belajar sejak zaman Rasulullah SAW. Hal ini terutama berlaku di pesantren tradisional, di mana tidak ada kelas untuk belajar.⁶⁵

e. Kitab-kitab klasik

Penelitian para ulama besar khilafah berujung pada terciptanya karya-karya klasik seperti kitab-kitab tasawuf dan kitab-kitab tauhid. Karya-karya Islam klasik, seperti terjemahan Al-Qur'an dan Mustolatul al-hadits yang dihasilkan ulama *Tabi'in* pada masa itu, merupakan karya Islam asli.

Kelima ciri khas pondok pesantren ini berbeda dengan lembaga pendidikan lain yang menggunakan literatur klasik untuk menggali hasanah budaya Islam. Di pesantren, "kitab kuning" telah menjadi merek dagang dari proses belajar mengajar.

⁶⁵M Amin Haedari dan Abdullah Hanif, *Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, 2 ed. (Jakarta: Ird Press, 2006), hal. 33.